

## RESEARCH ARTICLE

## Analisis Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Mimika

Febi Yuni Salzabilah<sup>1\*</sup>, Sartika Somoy Tangdo<sup>2</sup> Sambeko<sup>2</sup>, Arini Indah Nur Hafifa<sup>3</sup>, Johanis Nifanngeljau<sup>4</sup>

<sup>1\*,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Kota Timika/ Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Indonesia.

Email: febibilah61@gmail.com<sup>1\*</sup>, tikasomoy4@gmail.com<sup>2</sup>, nurhafifa022@gmail.com<sup>3</sup>, nifanjohanis@gmail.com<sup>4</sup>

### Histori Artikel:

Dikirim 1 Desember 2024; Diterima dalam bentuk revisi 10 Desember 2024; Diterima 10 Januari 2025; Diterbitkan 1 Februari 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

### Suggested citation:

Salzabilah, F. Y., Sambeko, S. S. T., Hafifa, A. I. N., & Nifanngeljau, J. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Mimika. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(1), 56–67. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i1.3516>.

## Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh upah minimum, tingkat pendidikan dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika. Data yang digunakan ialah menggunakan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi yang bersumber dari BPS periode 2015-2021. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linier berganda, yang mana dibantu dengan menggunakan Software SPSS 26. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ialah indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini), tingkat pengangguran tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) dan upah minimum Kabupaten berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) di Kabupaten di Kabupaten Mimika.

**Kata Kunci:** Upah Minimum; Tingkat Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ketimpangan Pendapatan.

## Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of minimum wages, education levels and human development index (HDI) on income inequality in Mimika Regency. The data used is secondary data, the data collection technique used in this study is documentation sourced from BPS for the 2015-2021 period. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis, which is assisted by using SPSS 26 Software. The results found in this study are that the human development index has no effect and is not significant on income inequality (Gini Ratio), the unemployment rate has no effect and is not significant on income inequality (Gini Ratio) and the minimum wage of the Regency has a significant effect on income inequality (Gini Ratio) in the Regency in Mimika Regency.

**Keyword:** Minimum Wage; Education Level and Human Development Index (HDI) and Income Inequality.

RESEARCH ARTICLE

## 1. Pendahuluan

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia melaksanakan program pembangunan ekonomi. Perkembangan pendapatan nasional riil merupakan salah satu aspek pembangunan ekonomi bersama dengan modernisasi aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Program pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup dan kemakmuran. Namun, pelaksanaan program tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan pendapatan. Kabupaten Mimika berlokasi di Provinsi Papua Tengah, Indonesia, memiliki sumber daya alam melimpah pada sektor pertambangan dan perkebunan. Wilayah seluas 21.693,52 km<sup>2</sup> dihuni oleh 219.689 jiwa (BPS, 2019) dengan mayoritas penduduk merupakan suku asli Papua seperti Amunge, Kamoro dan Asmat. Masyarakat Mimika memiliki warisan budaya beragam, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi serta bahasa-bahasa daerah seperti Dani, Ekari dan bahasa lokal lainnya. Perekonomian Kabupaten Mimika bertumpu pada sektor pertambangan emas dan tembaga. PT *Freeport* Indonesia (PTFI) berperan strategis dalam peningkatan pendapatan daerah. Namun, aktivitas pertambangan menimbulkan dampak pada lingkungan serta memicu konflik sosial dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Potensi pariwisata Kabupaten Mimika terlihat pada keberadaan hutan hujan tropis dan keunikan budaya tradisional. Pengembangan sektor pariwisata terkendala keterbatasan infrastruktur, meski upaya perbaikan berkelanjutan terus dilaksanakan. Meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam, ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan fundamental. Data menunjukkan disparitas pendapatan signifikan antara pekerja sektor pertambangan dan pertanian. Kesenjangan tersebut berdampak pada akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pengukuran ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika menggunakan indikator *Ratio Gini* sebagai parameter ketimpangan pendapatan.

Tabel 1. Rasio Gini Kabupaten Mimika Tahun (2015-2021)

Tahun	Rasio Gini (%)
2015	0,333
2016	0,289
2017	0,325
2018	0,263
2019	0,293
2020	0,339
2021	0,349

Berdasarkan data ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang diukur menggunakan *Ratio Gini* periode 2015-2021, menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya terkendali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat. IPM dikonstruksi menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dimensi pertama adalah kesehatan yang diukur menggunakan Angka Harapan Hidup saat lahir. Dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur menggunakan gabungan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi ketiga adalah kehidupan layak yang diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat, dengan pendekatan rata-rata pengeluaran per kapita sebagai representasi capaian pembangunan untuk standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

RESEARCH ARTICLE

**Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika Tahun (2015-2021)**

Tahun	IPM
2015	70,89
2016	71,46
2017	72,42
2018	73,15
2019	74,13
2020	74,19
2021	74,48

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 74,48 pada tahun 2021. Peningkatan yang terjadi secara signifikan ini merupakan hasil dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. Tingkat pengangguran masih menjadi salah satu tantangan signifikan yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah ini. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di sektor non-pertambangan, berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IPM mengalami tren positif, masih terdapat permasalahan struktural dalam penyerapan tenaga kerja yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

**Tabel 3. Tingkat Pengangguran Kabupaten Mimika Tahun (2015-2021)**

Tahun	Pengangguran (%)
2015	7,94
2016	7,24
2017	7,70
2018	8,30
2019	7,51
2020	7,80
2021	5,37

Berdasarkan Tabel 3, tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika dari tahun 2015 hingga 2021 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran tercatat sebesar 7,94% dan mengalami sedikit penurunan menjadi 7,24% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017, angka tersebut kembali naik menjadi 7,70% dan meningkat tajam mencapai 8,30% pada tahun 2018. Setelah periode tersebut, tingkat pengangguran mulai menunjukkan tren penurunan bertahap, yakni menjadi 7,51% pada tahun 2019 dan akhirnya mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 5,37% pada tahun 2021. Upah minimum memiliki peran penting dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (*Permenakertrans*) Nomor 7 Tahun 2013, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

**Tabel 4. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Mimika Tahun (2015-2021)**

Tahun	UMK (Rp)
2015	2.435.000
2016	2.487.474
2017	3.098.538
2018	3.368.421
2019	3.647.999
2020	3.958.444
2021	3.958.444

## RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan Tabel 4, upah minimum Kabupaten Mimika pada periode 2015-2021 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2016-2017 dengan peningkatan sebesar Rp 611.064, diikuti kenaikan sebesar Rp 269.883 pada tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2020-2021, upah minimum tetap bertahan di angka Rp 3.958.444 tanpa mengalami perubahan akibat dampak pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran menjadi tantangan signifikan yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika, terutama di sektor non-pertambangan yang berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi. Studi-studi terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara upah minimum, IPM, dan ketimpangan pendapatan, di mana peningkatan upah minimum dapat memberikan dampak yang beragam terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2011-2017 menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, di mana peningkatan IPM yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Ersad *et al.* di Sumatera Bagian Selatan, di mana IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena karakteristik sektor ekonomi yang dominan (pertanian, pertambangan, dan industri) tidak membutuhkan pekerja dengan IPM tinggi.

Penelitian Istikharoh *et al.* menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta, yang disebabkan oleh penyerapan tenaga kerja yang baik di sektor informal. Terkait upah minimum, penelitian yang sama menemukan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sejalan dengan temuan Nurmalisa Sungkar *et al.* (2015) yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum diikuti dengan perubahan kecil dalam rasio gini di Indonesia periode 1999-2013. Kabupaten Mimika memiliki karakteristik unik dalam dinamika ketimpangan pendapatannya, terutama karena keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menciptakan disparitas pendapatan antara pekerja formal dan informal, serta antara sektor pertambangan dan sektor lainnya. Faktor lain seperti kesulitan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan dan terpencil juga berkontribusi terhadap ketimpangan yang ada. Berdasarkan kompleksitas permasalahan ketimpangan ekonomi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif berupa asosiatif. Menurut (Aldoanus Jahang *et al.*, 2024) dalam penelitiannya asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab-akibat, yaitu antara variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumentasi data-data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan data dari sumber penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yaitu variabel X1 (Upah Minimum), X2 (Tingkat Pendidikan), X3 (Indeks Pembangunan Manusia) dan variabel Y (Ketimpangan Pendapatan). Data yang digunakan pada penelitian ini dari tahun 2015-2021. Teknik Analisis data yang digunakan ialah pengujian asumsi klasik, regresi linear berganda serta pengujian hipotesis, yang mana akan dibantu dengan menggunakan Software SPSS 26.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil

##### 3.1.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut (Ghozali, 2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen yang diprosikan dengan dewan direksi dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Indeks Pembangunan Manusia (X1)	7	7089.00	7448.00	7296.0000	141.74390
Tingkat Pengangguran (X2)	7	537.00	830.00	740.8571	95.82698
Upah Minimum Kabupaten (X3)	7	17.00	27.00	23.8571	3.80476
Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) (Y)	7	263.00	349.00	313.0000	31.60169
Valid N (listwise)	7				

Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 7 dari 7 data sampel. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) (Y) memiliki nilai minimum sebesar 263.00, nilai maksimum sebesar 349.00, dari periode 2015-2021 diketahui nilai mean sebesar 313.0000, serta nilai standar deviasi sebesar 31.60169 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Indeks Pembangunan Manusia (X1) dari 7 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 7089.00, nilai maksimum sebesar 7448.00, nilai mean dari periode 2015-2021 sebesar 7296.0000, serta nilai standar deviasi sebesar 141.74390 artinya nilai mean periode 2015-2021 lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Tingkat Pendidikan (X2) dari 7 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 537.00, nilai maksimum sebesar 830.00, nilai mean dari periode 2015-2021 sebesar 740.8571, serta nilai standar deviasi sebesar 95.82698 artinya nilai mean periode 2015-2021 lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Upah Minimum Kabupaten (X3) dari 7 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 17.00, nilai maksimum sebesar 27.00, nilai mean dari periode 2015-2021 sebesar 23.8571, serta nilai standar deviasi sebesar 3.80476 artinya nilai mean periode 2015-2021 lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

##### 3.1.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan grafik. Normal tidaknya data dapat dideteksi juga lewat plot grafik histogram. Uji normalitas dengan menggunakan alat uji analisis metode Kolmogorov Smirnov. Berikut tabel hasil uji metode Kolmogorov Smirnov.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 6. Uji Normalitas  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

N	<i>Unstandardized Residual</i>	
	Mean	7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	20.50181367
Most Extreme Differences	Absolute	.266
	Positive	.266
	Negative	-.186
Test Statistic		.266
Asymp. Sig. (2-tailed)		.143 <sup>c</sup>

Hasil Analisis yang ditemukan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa apabila probabilitas (sig) > 0,05 berarti data telah terdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian yang dilakukan maka diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,143 maka nilai 0,143 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi secara normal.

3.1.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
- 2) Jika nilai *tolerance* < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 7. Uji Multikoloniretas

Model	Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	<i>Unstandardized Coefficients</i>	<i>Standardized Coefficients</i>			Tolerance	VIF
	B	Std. Error				
(Constant)	-514.472	235.108	2.188	.116		
1 Indeks Pembangunan Manusia (X1)	.064	.032	2.029	.136	.671	1.491
Tingkat Pengangguran (X2)	.102	.042	2.413	.095	.832	1.201
Upah Minimum Kabupaten (X3)	-.616	1.095	-.563	.613	.781	1.281

Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sebab hasil perhitungan nilai tolerance dari tiap variabel independen tidak ada yang menunjukkan hasil kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hasil tiap variabel independen tidak ada yang lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada antar variabel independen dalam model regresi ini.

3.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

RESEARCH ARTICLE

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2002). Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika variabel independen tidak signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ) berarti model bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T <sub>hitung</sub>	Sing	keterangan
Indeks Pembangunan Manusia (X <sub>1</sub> )	2.029	.136	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tingkat Pengangguran (X <sub>2</sub> )	2.413	.095	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Upah Minimum Kabupaten (X <sub>3</sub> )	-.563	.613	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis yang ada, ditemukan bahwa setiap variabel independen memiliki nilai Sig > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

3.1.5 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Nilai ini adalah nilai uji autokorelasi yaitu interdependensi antar residual  $\rho_{res} = 0$ . Nilai d ini kemudian dibandingkan dengan nilai statistik Durbin Watson. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak, dilakukan identifikasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Menurut Winarno (2011), apabila nilai *Durbin Watson* berada di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 9. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.761 <sup>a</sup>	.579	.158	28.99394	2.736

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai  $du > DW < (4-du)$  atau  $1,841 > 2,736 < 2,1580$  artinya model regresi terkena masalah autokorelasi atau dengan kata lain ada korelasi antara kesalahan pengganggu. Oleh karena itu, untuk memperbaiki data yang terkena autokorelasi dilakukan dengan cara melakukan transformasi data menjadi lag variabel.

3.1.6 Uji Hipotesis Analisis Linear Berganda

Menurut Ghozali (2009), analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui koefisien-koefisien regresi serta signifikansi sehingga dapat digunakan dalam menjawab hipotesis yang ada.

Tabel 10. Analisis Lienar Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	913.333	755.883		1.208	.313
Indeks Pembangunan Manusia (X <sub>1</sub> )	-.082	.102	-.366	-.800	.482
Tingkat Pengangguran (X <sub>2</sub> )	-.179	.135	-.542	-1.319	.279
Upah Minimum Kabupaten (X <sub>3</sub> )	5.331	3.521	.642	8.514	.002

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linier berganda di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 913.333 + -0.082X_1 + -0.179X_2 + 5.331X_3 + e$$

Dilihat dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 913.333, artinya bila variabel bebas Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ), Tingkat Pengangguran ( $X_2$ ) dan Upah Minimum Kabupaten ( $X_3$ ) dianggap konstan maka dapat diprediksi Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) sebesar 913.333 satuan.
- 2) Variabel indeks pembangunan manusia ( $X_1$ ) pada model regres linier berganda diatas nilai koefisien sebesar -0.082. dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1 kali maka ketimpangan pendapatan (rasio gini) akan menurun sebesar -0.082 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 3) Variabel tingkat pengangguran ( $X_2$ ) pada model regres linier berganda diatas nilai koefisien sebesar -0.179. dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 kali maka ketimpangan pendapatan (rasio gini) akan menurun sebesar -0.179 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 4) Variabel upah minumum kabupaten ( $X_3$ ) pada model regres linier berganda diatas nilai koefisien sebesar 5.331. dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan upah minumum kabupaten sebesar 1 kali maka ketimpangan pendapatan (rasio gini) akan menurun sebesar 5.331 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

3.1.7 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan signifikansi level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) untuk pembangunan manusia, tingkat pengangguran, upah minumum kabupaten. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Sedangkan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). Adapun pengujian uji t dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	913.333	755.883		1.208	.313
Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ )	-.082	.102	-.366	-0.800	.482
Tingkat Pengangguran ( $X_2$ )	-.179	.135	-.542	-1.319	.279
Upah Minimum Kabupaten ( $X_3$ )	5.331	3.521	.642	8.514	.002

Adapun hasil interpretasi dapat disajikan ialah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Dijelaskan pula dalam hasil analisis regresi bahwa variabel indeks pembangunan manusia mempunyai nilai  $t_{hitung}$  -0.800 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.894 dan diperoleh nilai signifikansi 0.482 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ( $0.482 > 0,05$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_1$  ditolak.
- 2) Berdasarkan hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio

RESEARCH ARTICLE

Gini). Dijelaskan pula dalam hasil analisis regresi bahwa variabel tingkat pengangguran mempunyai nilai  $t_{hitung} -1.319$  lebih kecil dari  $t_{tabel} 1.894$  dan diperoleh nilai signifikansi  $0.279$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0.279 > 0,05$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_2$  ditolak.

- 3) Berdasarkan hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti menunjukkan bahwa variabel upah minumum Kabupaten berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Dijelaskan pula dalam hasil analisis regresi bahwa variabel upah minumum Kabupaten mempunyai nilai  $t_{hitung} 8.514$  lebih besar dari  $t_{tabel} 1.894$  dan diperoleh nilai signifikansi  $0.279$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0.002 < 0,05$ ). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_3$  diterima.

3.1.8 Uji F

Uji signifikansi F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah keenam variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini cara yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). Terhadap pengujian kelayakan model ini, dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3470.054	3	1156.685	.1476	.000 <sup>b</sup>
Residual	2521.946	3	840.649		
Total	5992.000	6			

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari  $0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan upah minumum Kabupaten secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen ketimpangan pendapatan (Rasio Gini).

3.1.9 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan dalam mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menggambarkan variasi variabel independen. Nilai  $R^2$  yang kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Oleh sebab itu dalam pengujian  $R^2$  ini, dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.761 <sup>a</sup>	.579	.558	28.99394	2.736

Berdasarkan pada hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) sebesar  $0.579$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) dapat dijelaskan oleh variabel independen indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan upah minumum Kabupaten sebesar  $57.9\%$ , sedangkan sebesar  $42,1\%$  dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar dari penelitian ini.

## RESEARCH ARTICLE

### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Hal ini ditunjukkan dalam hasil analisis regresi dimana variabel indeks pembangunan manusia memiliki nilai  $t_{hitung}$   $-0,800$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$   $1,894$  dan nilai signifikansi  $0,482$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0,482 > 0,05$ ). Dengan demikian, hipotesis H1 ditolak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas pembangunan suatu wilayah yang mencakup tiga dimensi utama (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak) memiliki peran penting di Kabupaten Mimika. Meskipun daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan tantangan pembangunan yang kompleks, peningkatan IPM melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan pendapatan per kapita belum mampu berkontribusi signifikan dalam pengurangan ketimpangan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Asman, Jelita Ramadhani, Muhammad Amir Arham (2024) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung}$   $-1,319$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$   $1,894$  dan nilai signifikansi  $0,279$  lebih besar dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0,279 > 0,05$ ), sehingga hipotesis H2 ditolak. Di Kabupaten Mimika, struktur ekonomi yang didominasi sektor pertambangan menciptakan pola penyerapan tenaga kerja yang tidak merata. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, namun tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Pengangguran juga berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, yang dapat memperburuk kemiskinan dan memperbesar jurang pendapatan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Irawan, Deny, Baiq Saripta Wijumulawiani (2024) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif meski tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Untuk variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK), hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini). Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$   $8,514$  lebih besar dari  $t_{tabel}$   $1,894$  dan nilai signifikansi  $0,002$  lebih kecil dari taraf signifikansi  $0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ), sehingga hipotesis H3 diterima. UMK sebagai kebijakan yang menetapkan batas minimal upah pekerja terbukti memiliki dampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika. Penetapan UMK yang memadai dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan tinggi, terutama dalam daerah yang didominasi sektor pertambangan. Dalam Kabupaten Mimika, UMK yang tinggi juga berpotensi meningkatkan daya beli pekerja lokal dan mendorong perputaran ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fanshuri dan Rizky (2022) yang menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) di Kabupaten Mimika. Pada tingkat pengangguran yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh serta tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) di Kabupaten Mimika. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten menunjukkan hasil yang berbeda, dimana variabel ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) di Kabupaten Mimika. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kebijakan Upah Minimum Kabupaten memiliki peran penting dalam mempengaruhi distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa diantara ketiga variabel yang diteliti, Upah Minimum Kabupaten merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika.

## RESEARCH ARTICLE

## 5. Referensi

- Agustin, N., Hidayat, M. S., & Umiyati, E. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 53-64. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i1.7346>.
- APJII, P., Pengawas, D., Pusat, B. P., Harian, B. P., Baru, D. A., APJII, A. P., ... & Data, G. (2014). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Jakarta: APJII*.
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan tapal kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313-326. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.08>.
- Asman, J. R., Arham, M. A., & Akib, F. H. Y. (2024). ANALISIS PENGARUH STRUKTUR EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3). <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23491>.
- Fanshuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, KEMISKINAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN (Studi Kasus di Kabupaten Kawasan Sleingkar Wilis Periode 2010-2019). *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(1), 148-160.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Castellán, J. (2002). Statistik non-parametrik: Teori dan aplikasi dengan program SPSS. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 171-184.
- Harlina, H., & Manduapessy, R. L. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(2), 131-156. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v3i2.403>.
- Herlinda, H., & Bakar, A. (2023). Analisis Ability To Pay Dan Willing To Pay Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(1), 20-42. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v3i1.383>.
- Himo, J. T., Rotinsulu, D. C., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara tahun 2010-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4), 124-135.
- Irawan, D., Wijumulawani, B. S., & Hak, M. B. U. (2024). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Investasi Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(3), 623-633. <https://doi.org/10.36985/y23kbn87>.

## RESEARCH ARTICLE

Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1). <https://dx.doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5436>.

Putry, A. T. D., & Tuasela, A. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap IPM di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(2), 105-122. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v3i2.408>.

Sungkar, S. N., & Nazamuddin, M. N. (2015). PENGARUH UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(2).

Winarno, W. W. (2017). Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviws.